

## Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu

Wiwit, Tri Sulistyarningsih, dan Muhammad Kamil  
(Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang)  
Email: only.wiwit@gmail.com

### Abstract

*This study aims to explain the problems in government programs in the provision of social assistance to the poor which are not appropriate. Based on the direction of President Joko Widodo through Ratas on March 16, 2016 states that social assistance is provided on a non-cash basis, one of which is through the BPNT program based on Permensos No.11 2018 which is a transformation of the Rastra program which has problems in distribution. The BPNT program is expected to reduce the burden of spending in meeting the basic needs of poor families, as social protection and poverty reduction. Batu City is one of the areas chosen as a Pilot Project since the BPNT program was formed in 2017. The implementation of the BPNT program in each region is not the same. There are even KPM who do not know if they receive BPNT Social assistance. So to find out the implementation of the BPNT program in Batu, monitoring and evaluation is needed in its implementation. The method in this study uses descriptive qualitative approach, providing an overview of developments in the application of the BPNT program in poverty alleviation. Data collection techniques are done by observation, interview and documentation. The research theory of the BPNT Program uses Monitoring and Evaluation of policies according to William Dunn who argues that monitoring is an internal and ongoing activity, a source of information which will later be used as an evaluation material to find out whether a policy is successful or not. The results of this study indicate that the implementation of monitoring and evaluation of the BPNT Program in Batu has implemented the principles of monitoring and evaluation and has been running quite well by BSP facilitators and the BPNT program is considered to have been on target, so as to accelerate the implementation of poverty reduction. BPNT program has been given to KPM Kota Batu as many as 5,649 KPM in 2018 then decreased in 2019 which is as many as 3,992 KPM. The inhibiting factors in monitoring and evaluating the BPNT program are first the capacity of Human Resources (HR) second, namely time.*

**Keywords:** *Monitoring and Evaluation of Policy, Program BPNT, Poverty Reduction*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Permasalahan pada program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial pada masyarakat miskin yang belum tepat. Berdasarkan arahan presiden Joko Widodo melalui Ratas pada 16 Maret 2016 menyatakan agar bantuan sosial diberikan secara non tunai, salah satunya melalui program BPNT berdasarkan Permensos No.11 Tahun 2018 dimana merupakan transformasi dari program Rastra yang memiliki masalah dalam penyalurannya. Program BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga miskin, sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kota Batu merupakan salah satu daerah yang terpilih sebagai Pilot Project sejak program BPNT dibentuk pada tahun 2017. Implementasi program BPNT di*

*masing-masing daerah tidaklah sama. Bahkan terdapat KPM yang tidak mengetahui jika menerima bantuan Sosial BPNT. Maka untuk mengetahui penerapan program BPNT di Kota Batu diperlukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, memberikan gambaran perkembangan dalam penerapan program BPNT dalam penanggulangan kemiskinan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori penelitian Program BPNT menggunakan Monitoring dan Evaluasi kebijakan menurut William Dunn yang mengemukakan monitoring merupakan aktifitas internal dan berkelanjutan, menjadi sumber informasi yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program BPNT di kota Batu telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan telah berjalan dengan cukup baik yang dilakukan oleh pendamping BSP dan program BPNT dinilai telah tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Program BPNT telah diberikan kepada KPM Kota Batu sebanyak 5.649 KPM pada Tahun 2018 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 3.992 KPM. Faktor penghambat dalam monitoring dan evaluasi program BPNT yaitu pertama kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kedua yaitu waktu.*

**Kata kunci:** *Monitoring, Evaluasi Kebijakan, Program BPNT, Kemiskinan.*

---

## PENDAHULUAN

Kota Batu para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagian besar adalah adanya penduduk miskin yang dimana mereka tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan masyarakat yang lain secara wajar (Renstra 2017-2022 dinsos batu, n.d.). Kemiskinan diukur berdasarkan dari segi ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan berdasarkan garis kemiskinan yang dimana penduduknya memiliki pengeluaran rata-rata perkapita dibawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2018). Dari hasil data BPS (Badan Pusat Statistik) kemiskinan di Kota Batu mengalami penurunan tiap tahunnya dimana data terakhir pada Tahun 2017 penduduk miskin kota Batu turun menjadi 4,31 % yaitu berarti jumlah penduduk miskin sekitar 8.770 jiwa dari 203.997 penduduk kota Batu yang sebelumnya pada Tahun 2016 penduduk miskin yaitu sekitar 4,48 % atau sebanyak 9.050 jiwa (Faizal, 2018). Adanya penurunan angka kemiskinan di kota Batu

tidak lepas dari peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Dengan adanya program-program yang dikleuarkan pemerintah bukan berarti masalah kemiskinan bisa ditanggulangi begitu saja secara mudah. Karena permasalahan kemiskinan di Kota Batu juga disebabkan oleh adanya program-program tersebut, Hal ini karena bantuan bantuan kemiskinan yang diberikan belum tersalurkan secara tepat sasaran. Penyebabnya karena data yang dipakai untuk memberikan bantuan bantuan program tersebut tidak up to date. Dilain hal dengan adanya bantuan bantuan program kemiskinan tersebut masyarakat justru ketergantungan dan cenderung tidak ingin keluar dari zona kemiskinan karena sudah terlalu nyaman mendapatkan bantuan, sehingga kejadian ini mengakibatkan alokasi pendistribusian bantuan bagi masyarakat miskin tidak tepat.

Merujuk pada permasalahan bantuan kemiskinan yang disalurkan belum tepat, pemerintah pusat tentu berperan dalam masalah kemiskinan yang ada didaerah. Maka berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo melalui Rapat Terbatas (Ratas) yang

dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 tentang penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dimana bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran program serta mendorong inklusi keuangan. Untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dilakukan secara non tunai maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Salah satu program yang disalurkan secara non tunai adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Sosial No.11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah dalam rangka mentransformasi program rastra.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut penyaluran program Rastra pada awal Tahun 2017 diubah menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan harapan dapat memberikan keleluasaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan (beras dan atau telur) serta dapat berjalan sesuai indikator 6T.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif, dimana metode ini bertujuan untuk memahami suatu kejadian atau fenomena sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan langsung melalui obyek atau sumber yang ada di lapangan berupa opini dari subyek penelitian dan hasil observasi kemudian data

sekunder berupa buku, Salinan peraturan, berita-berita dan dokumen pendukung lainnya. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Batu yang beralamatkan Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai 2 Jalan. Panglima Sudirman No.507, Kota Batu, Jawa Timur, E-warong KUBE PKH.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Monitoring & Evaluasi Kebijakan**

Kebijakan publik merupakan suatu serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang dilakukan oleh sekelompok aktor atau seorang aktor berkaitan dengan tujuan yang dipilih serta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan tersebut sejatinya masih berada pada batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor serta merupakan serangkaian program sebagai salah satu tahap penyelesaian masalah yang dihadapi (Wahab, 2015). Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn memiliki lima tahapan proses yaitu merumuskan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, monitoring atau pemantauan kebijakan, dan evaluasi kinerja kebijakan (Nugroho, 2014). pada dasarnya proses kebijakan publik merupakan proses yang berlangsung dengan terus menerus. Pada saat kebijakan telah berada di tahap evaluasi kebijakan, proses tersebut akan kembali pada proses seperti awal lagi yaitu perumusan masalah dengan catatan jika kebijakan tersebut tidak memberikan dampak yang diinginkan. Pada penelitian ini akan mengkaji program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan melihat tahapan dari monitoring dan evaluasi kebijakan program tersebut. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada tahap monitoring dan evaluasi kebijakan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Batu.

William Dunn (1981) mengemukakan monitoring atau pemantauan diartikan sebagai suatu aktifitas internal dan

berkelanjutan, sisi internalnya melalui kegiatan dan hasil dari suatu program yang nantinya akan dijadikan sebagai penentu atau sumber informasi apakah program tersebut yang telah di implementasikan sesuai dengan rencana dan Dunn menjelaskan monitoring memiliki 4 (empat) fungsi dalam analisis kebijakan (1) Ketaatan atau Compliance (2) Pemeriksaan, (3) Laporan atau accounting (4) Penjelasan atau explanation (Dunn, 2003). Menurut Kusek (2004), monitoring merupakan suatu proses kegiatan mengidentifikasi secara sistematis dengan mengumpulkan data sesuai indicator yang telah ditentukan pada setiap tahapan yang ada dalam program (Hardlife & Zhou, 2013). Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Monitoring atau pemantauan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah implementasi program yang dibuat telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan maupun sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, adakah hambatan-hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program mengatasi hambatan tersebut. Sehingga melalui kegiatan monitoring seseorang atau organisasi dapat menentukan apakah sumberdaya yang ada telah mencukupi dan apakah telah digunakan dengan baik atau tidak, apakah kapasitas yang dimiliki sudah sesuai dengan kebutuhan dan mencukupi, serta apakah semua pihak telah melakukan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan evaluasi diartikan sebagai penilaian atau peningkatan kinerja suatu program yang sedang dilaksanakan dan hasil evaluasi nantinya dapat kita nilai apakah sebuah program atau kebijakan memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju (Hardlife & Zhou, 2013). Dari evaluasi nantinya akan diketahui keberhasilan

ataupun kegagalan suatu kebijakan, sehingga nantinya secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan atau bahkan harus dihentikan (Mulyadi, 2016).

Evaluasi kebijakan juga berfungsi menilai keselarasan antara teori kebijakan dengan praktik implementasi dilapangan berupa dampak, apakah dampak kebijakan yang diterapkan sesuai dengan perkiraan. Dari hasil ini nanti dapat dilihat apakah sudah tepat sasaran, efisien dan efektif atau memiliki dampak yang luas atau tidak. Evaluasi penelitian ini nantinya akan mengukur tingkat keberhasilannya secara Output atau hasil dan impacts atau dampak. Pada dasarnya evaluasi tidak bisa dilakukan apabila tanpa monitoring hal ini karena tidak mempunyai data dasar untuk melakukan analisis, oleh karena itu monitoring dan evaluasi berjalan seiringan.

tahapan monitoring dan evaluasi pada dasarnya untuk memberikan acuan dan pemahaman dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap suatu kegiatan program, mengetahui keberhasilan program, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan program, sehingga mendapatkan data atau informasi mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Batu kemudian sebagai bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan, dalam rangka peningkatan program kebijakan penanggulangan kemiskinan.

#### **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Penanggulangan Kemiskinan**

Pada tanggal 26 April 2016 dalam rapat terbatas tentang keuangan inklusif Presiden Joko Widodo memberikan arahan jika bantuan sosial subsidi disalurkan secara non tunai, arahan ini sesuai dengan Perpes No.82 Tahun 2016 tentang strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyatakan jika strategi pengelolaan keuangan dan hubungan

masyarakat dengan perbankan merupakan upaya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Saat ini strategi tersebut telah berjalan melalui penyaluran bantuan sosial secara nontunai yang diharapkan dapat meningkatkan keefektifitasan dan ketepatan sasaran serta mendorong keuangan inklusif, salah satunya melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimana kondisi sosial ekonominya berada 25% terendah di daerah pelaksana. Dalam rangka meningkatkan keefektifitasan dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program agar lebih dimudahkan dalam pengontrolan, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Program ini merupakan kebijakan dari Kementerian Sosial yang berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial No.11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

BPNT ini setiap bulannya disalurkan dengan system transfer kepada KPM sebesar Rp.110,000,- melalui mekanisme uang elektronik yang ada dalam KKS dan hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan berupa telur dan atau beras yang bisa dicairkan di E-warong atau agen yang telah bekerjasama dengan bank penyalur, bantuan tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang ataupun komoditi lain tetapi bantuan tersebut dapat digunakan kapanpun sesuai kebutuhan KPM dan akan terakumulasi secara otomatis pada e-wallet apabila KPM memiliki saldo sisa dan jumlah tersebut tidak akan hangus bila tidak digunakan pada bulan sebelumnya.

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk

miskin sebagai rangka menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ("Penanggulangan kemiskinan," n.d.). Dalam Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah program dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin sebagai peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda kebijakan penting karena jika pemerintah tidak aktif dalam masalah kemiskinan maka pemerintah dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.

Dalam usaha untuk terus menekan angka kemiskinan, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yaitu dengan, Perbaikan serta pengembangan sistem perlindungan sosial, Peningkatan akses pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan Pembangunan yang inklusif (Kemiskinan, 2011). Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda kebijakan yang penting karena apabila pemerintah melalaikan masalah kemiskinan maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini terjadi karena sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat.

#### **Proses monitoring dalam penyaluran Program BPNT**

Dalam rangka untuk memastikan program BPNT yang diberikan pada daerah terkhusus Kota Batu perlu dilakukan pengendalian program agar tetap searah dengan kebijakan yang mencakup koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan monitoring yang dilakukan dalam program BPNT

digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program BPNT pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya. Di kota Batu program BPNT dilakukan dengan monitoring, evaluasi, sosialisasi dan edukasi dimana sudah satu paket. Ketika datang itu sudah monitoring lalu menanyakan permasalahannya lalu langsung evaluasi kemudian sosialisasi dijelaskan kembali bagaimana menangani masalahnya dan kemudian edukasi diberikan arahan apa yang harus dilakukan. Sebelum melaksanakan monitoring Program BPNT terlebih dahulu dipersiapkan tempat atau sasaran mana yang akan didatangi, siapa saja yang akan terlibat dalam monitoring pada saat itu serta apa peran mereka kemudian menentukan perencanaan kerja yang akan dilakukan, mengumpulkan data yang nantinya dianalisis kemudian dijadikan rekomendasi atau dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali.

Adapun komponen yang dilakukan dalam monitoring dan oleh Tim koordinasi bantuan sosial pangan pusat dan tim pengendali bersama dengan Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah melakukan monitoring secara berkala terhadap (1) proses registrasi atau pembukaan rekening KPM, (2) proses pergantian KPM jika diperlukan seperti yang telah diatur dalam proses penggantian KPM yang telah dijelaskan sebelumnya (3) realisasi terhadap penyaluran dana yang diberikan Bank Kepada Rekening penerima, (4) sebaran dan keterjangkauan ewarong kepada KPM, (5) ketersediaan bahan pangan dan harga pangan di ewarong kemudian dibandingkan dengan harga yang berlaku dipasar secara umum apakah lebih murah atau lebih mahal, (6) kepatuhan ewarong dalam menjualkan bahan pangannya terutama beras dan tau telur, (7) kepatuhan KPM dalam membeli bahan pangan menggunakan kartu Kombo atau KKS, (8) kinerja pendukung penyaluran

BPNT seperti mesin EDC, sinyal, jaringan, dll, (9) kemampuan ewarong dalam menjalankan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul saat melakukan transaksi, (10) keberhasilan transaksi antara ewarong dengan KPM, (11) adakah biaya tambahan yang dikeluarkan kepada KPM, (12) efektivitas pengelolaan dan penanganan pengaduan, penyampaian informasi, sosialisasi, dan edukasi (13) masalah dana bantuan bagi KPM yang tidak melakukan transaksi lebih dari satu bulan. (Maharani, 2017)

### **Mekanisme Penyaluran Program BPNT**

Mekanisme penyaluran program BPNT dilakukan melalui tahapan yaitu, pertama registrasi dana atau pembukaan rekening, awalnya dilakukan pemberitahuan kepada KPM BPNT dimana kementerian yang menangani pelaksanaan BPNT memberitahukan daftar KPM perdesa/kelurahan kepada bupati/walikota, tim koordinasi bansos pangan daerah kabupaten/kota dan kepala dinas sosial kemudian berkoordinasi dengan Bank Penyalur terkait yaitu bank BNI sebagai bank yang bekerjasama dengan pemerintah kota Batu untuk memadankan atau menyesuaikan data KPM BPNT, jadwal registrasi, pemberitahuan atau pengumuman kepada KPM agar melakukan registrasi kemudian melaporkan hasil registrasi. Kemudian pelaksanaan registrasi dimana KPM BPNT menerima surat pemberitahuan dari walikota, tim koordinasi bansos pangan daerah kota batu dan kepala dinas sosial untuk datang membawa dokumen pendukung registrasi dan dokumen identitas lalu dokumen diperiksa kelengkapannya. Petugas bank penyalur mencocokkan data kartu kombo dan kelengkapannya dengan dokumen identitas yang telah dibawa oleh KPM.

Kedua, edukasi dan sosialisasi, dilakukan setelah registrasi dan pembukaan rekening

yang dimana diberikan untuk KPM, pendamping dan aparat pemerintah daerah Kota Batu dilaksanakan pada saat bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan KPM dan pengaktifkan kartu kombo.

Ketiga, penyaluran BPNT, proses penyaluran BPNT dilakukan oleh Bank BNI selaku bank penyalur yang digunakan oleh pemerintah Kota Batu dan diberikan tanpa dikenakan biaya.

#### **Relasi antar aktor dalam Monitoring Penyaluran BPNT**

Pendamping BSP memberikan wawasan kepada KPM dan ewarong. Proses pendampingan ini dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi yang dianggap penting dalam membangun wawasan dan dapat merubah mindset para KPM dan atau pengelola Ewarong. Setiap monitoring, para pendamping menjadikan momentum ini untuk melihat juga bagaimana perkembangan para KPM dan atau pengelola ewarong dalam pelaksanaan BPNT dilapangan. Oleh karena itu diperlukan aktor untuk berkoordinasi dalam menangani masalah yang terjadi dilapangan dimana sebagai penengah jika terjadi hal-hal yang menghambat terutama dalam hal monitoring, hasil akhirnya nanti dijadikan laporan oleh pendamping BSP dan dijadikan bahan evaluasi.

Koordinator BPNT didalam koordinasinya saling bekerja sama dengan TKSK dan pendamping PKH untuk memberikan sosialisasi, pembekalan mengenai segala macam hal-hal yang berkaitan dengan BPNT. Mengadakan pertemuan guna evaluasi, monitoring, memecahkan masalah yang ditemui, serta bersama-sama mengontrol penyelenggaraan program BPNT. Kemudian tidak ketinggalan pula Koordinator Kota dan TKSK ikut mengawal pelaksanaan BPNT dilapangan. Hingga saat ini interaksi pendamping BSP tidak jauh berbeda sebagaimana tugas pendamping yang dikerjakan selama ini misalnya dalam

memecahkan masalah serta membantu kendala-kendala yang dihadapi oleh KPM dan Ewarong

#### **Evaluasi Program BPNT**

Keberhasilan dalam pembangunan yang dilaksanakan sebuah negara termasuk Indonesia dapat dilihat melalui kondisi kesejahteraan masyarakatnya, dimana kondisi kemiskinan menjadi indikator yang valid untuk dalam menilai suatu pembangunan atau program. Kemiskinan yang dialami seseorang bisa juga dikatakan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan berbagai program dimana salah satunya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat agar bisa menanggulangi kemiskinan. Meningkatnya angka jumlah penduduk miskin atau belum dapatnya ditanggulangi seluruh penduduk miskin melalui program bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu kurang efektifnya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan sehingga belum atau tidak tercapainya sasaran yang diinginkan. Hasilnya, penduduk miskin belum bisa diatasi dengan cepat dan bahkan jumlahnya cenderung meningkat. Melihat kondisi tersebut maka perlu dilakukan evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi ini nantinya akan dapat diketahui kendala-kendala serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai alat informasi untuk melakukan perbaikan.

#### **Hasil Pelaksanaan Program BPNT Kepada KPM**

Dinas Sosial Kota Batu selaku Organisasi Pemerintah Daerah yang mengurus bidang sosial memiliki tugas dan wewenang untuk membina jalannya pelaksanaan Program BPNT di Kota Batu. Kota Batu terdiri dari 24 desa dari 3 kecamatan dengan total penerima BPNT sebanyak 5.649 KPM bersumber dari

Basis Data Terpadu (BDT). KPM bahwa KPM merasakan perbedaan program BPNT dengan program-program sebelumnya yang KPM dapatkan. Dengan adanya BPNT ini para KPM merasakan kepuasaan yaitu berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga dalam membeli kebutuhan pangan walaupun hanya beras dan telur. Walaupun KPM berharap jika mereka tidak hanya dapat beras dan atau telur saja, tetapi diharapkan dapat mencairkan komoditi yang lain.

#### **Dampak Program BPNT Terhadap Ewarong**

Implementasi program BPNT di beberapa tempat tidaklah selalu sama. Hal ini tergantung bagaimana KPM dan pengelola ewarong sendiri yang dapat memaksimalkan program. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 8 ketua Ewarong yang ada di Kota Batu dapat dipahami jika setelah adanya program BPNT ini mereka merasakan perubahan. Pengelola Ewarong yang juga sekaligus merupakan KPM merasa terbantu dengan program BPNT apalagi mereka juga sebagai pengurus ewarong dimana mendapatkan penghasilan pula dari Ewarong yang dikelola. Perlu diketahui jika pengelola ewarong merupakan masyarakat miskin yang dipilih kemudian diberdayakan melalui Ewarong oleh Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Batu yang dianggap telah kompeten dan mampu membantu menjalankan program BPNT.

Pengelola Ewarong bertugas membantu KPM yang ingin mencairkan BPNT. Pada dasarnya mekanisme yang dilakukan pada system jual beli atau belanja yang dilakukan pembeli kepada penjual antara pada umumnya dengan belanja pada program BPNT adalah sama. ada uang ada barang, barang diberi sesuai jumlah pesanan dan jumlah uang yang dimiliki pembeli. Namun dalam program BPNT yang membedakan antara jual beli pada umumnya adalah transaksi yang dilakukan. Apabila warung atau toko pada umumnya melakukan transaksi tunai dan nontunai maka berbeda dengan

BPNT dimana hanya menggunakan Non Tunai sebagai bentuk pembayarannya, rasio ewarong adalah 1:250 maknanya 1 ewarong dapat melayani minimal 250 KPM. Pada mekanisme pencairan BPNT yang ada di Kota Batu terdapat temuan menarik dari hasil observasi yang dilakukan peneliti. Dimana KPM penerima BPNT bebas melakukan transaksi dengan mekanisme "bantuan + uang tunai" apabila barang yang diinginkan KPM harganya melebihi dari jumlah bantuan BPNT senilai Rp 110,000. Namun hal ini dilakukan dengan adanya penawaran diawal oleh pengelola ewarong kepada KPM terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi, apabila KPM setuju maka transaksi akan dilanjutkan. Kemudian temuan kedua yang didapatkan yaitu untuk memikat KPM agar melakukan transaksi terus menerus ewarong melakukan inovasi dengan memberikan doorprize bagi KPM yang rajin bertransaksi setiap bulannya di ewarong tersebut.

Aksesibilitas di kota Batu dalam penyaluran BPNT tergolong mudah, karena hampir setiap daerah baik kecamatan dan kelurahan atau desa sudah terdapat ewarong, sehingga hal ini memudahkan KPM untuk berbelanja. Pada prinsip dasar program BPNT, jika KPM bebas memilih tempat belanja atau mencairkan BPNT dimanapun KPM inginkan. Sehingga tidak menuntut KPM hanya pada 1 tempat saja, hal ini memberikan keuntungan dan kemudahan bagi KPM dalam hal aksesibilitas tempat pencairan BPNT.

#### **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan poin penting dalam pelaksanaan kebijakan program ini. SDM yang kompeten sangat dibutuhkan, Jika SDM masih kurang atau dibawah standart baik dari pengetahuan mengenai program BPNT maka tujuan dari program tidak akan bisa tercapai. Didalam implemmentasi kebijakan kemampuan memanfaatkan sumberdaya akan



mempengaruhi keberhasilan program yang ingin dicapai, tanpa adanya dukungan sumber daya manusia tentunya sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan.

Dalam monev program program BPNT Sumber Daya Manuai (SDM) menjadi salah satu kendala atau penghambatnya. Hambatan tersebut ada karena sumber daya manusia yang masih ada belum mengerti akan cara penerapannya ataupun tidak mengetahui akan substansi dari kebijakan BPNT. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program BPNT terkhusus KPM selaku penerima membuat banyak masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya program BPNT kemudian banyak KPM hanya sekedar menerima namun tidak mengerti cara pengambilannya. Adapun hambatan yang terjadi dalam monitoring dan evaluasi program BPNT yaitu pertama, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih ada yang belum bisa menggunakan mesin EDC begitupun pengelola Ewarong Kube PKH, Mereka beralasan jika takut menggunakan mesin tersebut.

Jika pengelola ewarong tidak bisa menggunakan EDC maka penyaluran bantuan BPNT tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Temuan hasil monitoring ini menjadi penghambat dalam evaluasi nantinya karena dengan adanya bantuan ini diharapkan masyarakat miskin mampu menggunakan atau bertransaksi dengan EDC sehingga dapat mendorong transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Hal ini juga didukung oleh faktor lain yaitu banyaknya penerima bantuan yang datanya tidak valid, berdomisili ditempat lain atau pindah dan meninggal dunia sehingga ini semua berakibat pada jalannya program BPNT ditengah masyarakat tidak berjalan dengan baik sehingga menjadi penghambat.

Kedua, Ewarong KUBE PKH (a) kepatuhan ewarong dalam jadwal buka tutup, pada saat pelaksanaan monev ada ewarong tutup yang

tidak sesuai jadwalnya, padahal monev tersebut bertepatan dengan tanggal tanggal pencairan BPNT (b) kepatuhan pengurus ewarong yang juga merupakan KPM dalam menjual beras dan atau telur kepada KPM diwilayahnya dimana ditemukan pemaketan oleh ewarong serta ketersediaan dan harga pangan di ewarong. Hambatan yang menjadi Kendala. tidak hanya berasal dari masyarakat saja melainkan pemerintahan itu sendiri juga seperti keterbatasan baik kuantitas maupun kualitas. Ketiga, kurangnya pendamping BSP, dalam pendampingan BSP koordinator kota hanya seorang diri mengerjakan laporan hasil monitoring karena TKSK dan pendamping PKH hanya membantu sebagai pendampingan dalam monitoring saja namun untuk hasil akhirnya tetap bermura kepada Kordinator kota.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam monev tidak semuanya seperti yang telah dijelaskan diatas, Karena dalam monev BPNT tidak semua sumber daya manusianya tidak kompeten. Karena padadasarnya Sumber daya yang kompeten akan melaksanakan program dengan baik sehingga tujuan program dapat tercapai. Adapun faktor-faktor pendukung monev dalam program BPNT yaitu pertama, inisiatif pengelola ewarong, untuk memikat para KPM untuk mencairkan bantuannya pengelola ewarong membuat semacam doorprize. Hal ini dilakukan agar para KPM tidak melipat gandakan pencairannya dibulan selanjutnya sehingga tujuan pemberian doorproze ini agar KPM setiap bulan mencairkan bantuan BPNT yang diberikan.

#### **Waktu**

Waktu menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur jalannya suatu program, begitupun dalam program BPNT. Ketepatan waktu merupakan jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan yang ditetapkan, karena jika dalam organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan benar sebelum batas waktu yang telah ditentukan

maka bisa dikatakan pelaksanaannya sudah cukup efisien. Program BPNT dalam pencairannya sudah terbilang tepat waktu dimana setiap bulannya dana Rp 110,000 disalurkan oleh bank penyalur pada tanggal 10 tiap bulan.

Sebelumnya penyaluran dana BPNT dilakukan pada setiap tanggal 25 namun terjadi perubahan pada pertengahan tahun 2019. Perubahan ini terjadi dikarenakan pada tanggal 25 atau tanggal diakhir bulan bank penyalur banyak melakukan transaksi yang lain sehingga agar penyaluran efektif maka pencairan dirubah menjadi tanggal 10 setiap bulannya. Dengan adanya penyaluran atau pencairan BPNT yang tepat waktu maka bisa dikatakan jika hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam program BPNT agar berjalan dengan baik. Apabila Penyaluran dana BPNT mengalami keterlambatan hal ini disebabkan karena pada tanggal penyaluran bank penyalur sedang libur atau hari raya, maka solusinya ada penyaluran akan disalurkan sebelum tanggal penyaluran atau tiga hari sebelum penyaluran. Program BPNT jika tidak dicairkan dalam waktu lebih dari 3 bulan secara otomatis bank penyalur akan memberhentikan penyaluran bantuan kepada KPM. Pemutusan bantuan ini dilakukan karena KPM tidak tepat waktu dalam pencairan, dimana KPM beranggapan jika tidak diambil berbulan-bulan bantuan tersebut tidak akan hangus. Akan tetapi dengan tidak diambilnya atau dicairkannya dana BPNT tersebut pemerintah maka menganggap KPM sudah tidak membutuhkan bantuan. Dengan tidak tepat waktunya KPM dalam mencairkan BPNT menjadikan faktor penghambat program BPNT. Hal ini dikarenakan untuk mengurus kembali data KPM yang telah diputus pencairannya membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan karena prosesnya harus dilakukan dari awal lagi keluarga miskin sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan ditingkat penerima yaitu KPM

sekaligus sebagai penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Melalui Peraturan Menteri sosial Nomor.11 Tahun 2018 yang telah memberi pedoman tentang petunjuk teknis pelaksanaan program BPNT. Kebijakan ini merupakan bantuan yang diterima KPM sebesar Rp 110,000,- setiap bulannya melalui Kartu Kombo KKS yang dapat digunakan sebagai alat transaksi mencairkan bahan pangan berupa beras dan atau telur yang dapat dicairkan melalui ewarong. Penerima program BPNT merupakan keluarga miskin yang telah terdata secara rinci dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki pusat. Kota Batu merupakan salah satu Pilot project yang menjalankan program BPNT sejak awal terbentuk yaitu pada awal Tahun 2017 bulan Februari. Pelaksanaan program BPNT di Kota Batu melibatkan Dinas Sosial sebagai penanggung jawab, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga sebagai Tim Koordinasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program BPNT dilakukan oleh Pendamping Bantuan Sosial Pangan (BSP) yaitu Koordinator Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH. Secara keseluruhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kota Batu dalam program BPNT ini pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring evaluasi dan telah berjalan dengan cukup baik. Penerapan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi ini dapat dilihat dari kerjasama antar pendamping BSP dalam berkoordinasi.

## **KESIMPULAN**

Program BPNT merupakan Kebijakan disitriburif dari Kementerian sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan ditingkat penerima yaitu KPM sekaligus sebagai penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi

keluarga miskin. Melalui Peraturan Menteri sosial Nomor.11 Tahun 2018 yang telah memberi pedoman tentang petunjuk teknis pelaksanaan program BPNT. Kebijakan ini merupakan bantuan yang diterima KPM sebesar Rp 110,000,- setiap bulannya melalui Kartu Kombo KKS yang dapat digunakan sebagai alat transaksi mencairkan bahan pangan berupa beras dan atau telur yang dapat dicairkan melalui ewarong. Penerima program BPNT merupakan keluarga miskin yang telah terdata secara rinci dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki pusat.

Kota Batu merupakan salah satu Pilot project yang menjalankan program BPNT sejak awal terbentuk yaitu pada awal Tahun 2017 bulan Februari. Pelaksanaan program BPNT di Kota Batu melibatkan Dinas Sosial sebagai penanggung jawab, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga sebagai tim koordinasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program BPNT dilakukan oleh Pendamping Bantuan Sosial Pangan (BSP) yaitu Koordinator Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH.

Secara keseluruhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di kota Batu dalam program BPNT ini pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring evaluasi dan telah berjalan dengan cukup baik. Penerapan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi ini dapat dilihat dari kerjasama antar pendamping BSP dalam berkoordinasi. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan monitoring dan evaluasi yang dilakukan berupa penyaluran dana, ketersediaan dan harga pangan di ewarong, kepatuhan ewarong dalam menjual beras dan telur serta kepatuhan KPM dalam membeli bahan pangan dengan menggunakan kartu kombo, kinerja infrastruktur teknologi perbankan dan ewarong, misal mesin EDC, sinyal, dll serta penyampaian informasi, sosialisasi dan edukasi.

Pelaksanaan program BPNT dikatakan cukup baik karena tentu masih terdapat permasalahan atau faktor penghambat yang muncul dari pelaksanaan kegiatan. Beberapa diantaranya seperti, pertama kapasitas sumber daya manusia (SDM) contohnya, sebagian KPM dan pengelola ewarong belum mengerti akan cara penerapan serta mengetahui adanya program BPNT dan hanya sekedar menerima namun tidak mengerti cara pencairannya (tidak berani menggunakan mesin EDC), kedua waktu contohnya jika BPNT tidak dicairkan dalam waktu lebih dari 3 bulan secara otomatis penyaluran akan dihentikan karena dianggap sudah tidak butuh bantuan, hal ini tentu akan menghambat program BPNT karena harus mengurus kembali data KPM yang telah diputus dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.

Diterapkannya monitoring dan evaluasi dalam menanggulangi kemiskinan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai ini memberikan keuntungan baik secara teknis pelaksanaan program serta acuan dan pemahaman dalam rangka pengawasan pembinaan program BPNT, mengetahui keberhasilan program, kemudian memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan program sehingga menjadi bahan evaluasi dan pelaporan. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dinilai sudah tepat sasaran sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, meningkatnya ketahanan pangan dan memberikan gizi seimbang kepada KPM, membantu mengurangi beban pengeluaran serta mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Muhammad. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik* Vol.11 No.01 Januari 2017.

- Aditya wisnu, Risnandar, Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai Di Indonesia, *Jurnal Sosio Konsepsial* Volume 7 No.03 Tahun 2018.
- Aritonang, Dinoroy Marganda, 2017 Perkembangan Pengaturan Format Dekonstrasi di Indonesia (*The Evolution of Deconcentration Form Arrangement in Indonesia*) *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume.14 No.2, Hal.200
- Azwar, saifuddin. 2003. Relibialitas dan validitas. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Bagong, Suyanto. 2013, Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya, Malang, INTRANS Publishing.
- Benny, Rachman. Efektifitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT), *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol:16 No.1 Juni 2018.
- Dunn, William N,2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadari Nawawi & Martini Hadari, 1995, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke-2.
- Ika Surya, weni Rosdiana, Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warong Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, *Jurnal. Fakultas Ilmu sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya*
- Mulyadi, Deddy, 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung, Alfabeta, Edisi Revisi.
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, kualittif dan R&D, Bandung, Alfabeta, cetakan ke-22.
- The Satisfaction Comparison of Bantuan Pangan Non Tunai recipients and Rastra Recipinets In Cakung Distrct, east Jakarta, Wahyu Dyah, Bambang Mulyatno dkk, Jurnal Ilmiah Econosains* Volume.15 No.2 Hal.283, Tahun 2017.
- Ramadhan, Tondhi. Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru, *Jurnal Fisipol* Vol:5 edisi II Desember 2018.
- Utilisation of Monitoring and Evaluation Systems by Development Agencies, Zvhouse Hardlife, GideonZhou, American International *Journal Contemporary Researech*, Volume.3 No.3 2013.
- Widodo, Joko. 2013, Analisis Kebijakan Publik, Malang:2006.